



Malioboro Jadi Pedestrian, Kondisikan Kebiasaan Baru Jalan Kaki



KEPALA Dinas Perhubungan DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyatakan implementasi penataan Malioboro sebagai kawasan pedestrian perlu didukung dengan sikap mental dan kebiasaan baru masyarakat. Hal itu harus terus disosialisasikan.

"Sebenarnya kita mengondisikan bagaimana orang-orang mempunyai kebiasaan baru, mungkin seperti kondisi sekarang pakai masker. Kebiasaan baru itu adalah orang mau berjalan kaki atau menggunakan kendaraan tradisional untuk mobilitasi dan menggunakan angkutan umum publik," kata Ni Made di kantornya kemarin (2/12).

↳ Baca Malioboro... Hal 7

SUASANA BARU: Beberapa pejalan kaki berjalan di trotoar sisi timur Malioboro. Ke depan Malioboro menjadi kawasan khusus pedestrian.



Malioboro Jadi Pedestrian, Kondisikan Kebiasaan Baru Jalan Kaki

Sambungan dari hal 1

Sekarang ini implementasi pedestrian Malioboro istilahnya masih uji coba dari pukul 18:00 sampai 21:00. Untuk itu, pihaknya masih akan melihat terlebih dahulu. "Nah, kemudian, kita tidak hanya bicara ruas utama Jalan Malioboro karena kita bicara kawasan. Berarti dampak pengaturan kebijakan itu adalah bagaimana yang ada di dalamnya. Karena kalau kita bicara pedestrian yang diperbolehkan melintas adalah kendaraan tertentu saja," kata mantan kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY ini.

Kendaraan tertentu itu berupa angkutan publik, ambulans maupun pemadam kebakaran. Artinya, fungsi dari sirip-sirip maupun ventilasi-ventilasi ruas Jalan Malioboro perlu diatur. "Termasuk kawasan sekitarnya yang sekarang kita buat mana-

jemen rekayasanya melalui yang berlawanan arah," ucapnya.

Berkaitan dengan penataan ke depan saat semua pihak yang berkompeten berbicara tentang implementasi pedestrian Malioboro secara penuh, mungkin dari segi penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) maupun aktivitas ekonomi di kawasan tersebut, menurut Ni Made, barulah kemudian ada penetapan rekayasa manajemen lalu lintas dengan pedestrianisasi.

Berarti, terdapat hal-hal yang kemudian perlu diantisipasi yaitu berkaitan dengan ketersediaan lahan parkir. Sebenarnya ketika berbicara pedestrian maka tidak berpengaruh dengan penyediaan parkir.

"Orang melintas kok, bukan parkir di badan jalan. Ini harus diberi catatan, ketika kita bicara di situ (kawasan Malioboro) jadi pedestrian, kita bukan bicara parkir di ruang jalan dan

badan milik jalan. Itu hanya keterbatasan orang untuk melintas, bukan persoalan parkir sebenarnya," jelasnya.

Masih berkaitan dengan parkir, ketika Malioboro jadi pedestrian, maka sirip-sirip itu dua arah. Artinya kendaraan bisa masuk dari sisi Jalan Mangkubumi maupun sisi jalan di barat Malioboro.

"Dari situ (kendaraan) bisa melintas. Ini berkaitan dengan parkir. Sudah ada ABA, Beskalan dan parkir pasar sore selatan Pasar Beringharjo. Kita optimalkan di situ," tambahnya.

Harapannya, dari persiapan parkir itu terbuka peluang usaha menyiapkan ruang-ruang parkir tidak pada badan jalan tetapi pada lokasi-lokasi yang sudah meraka kondisikan sebagai parkir.

"Parkir kan hanya di sirip-sirip. Itu kan ngantong, jangan di badan jalan. Karena jelas badan jalan itu bukan tempat parkir. Badan

jalan itu on street," terangnya.

Mengenai kendala, Made menjelaskan pasti ada seperti halnya masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) punya tugas dan kewenangan sendiri.

Persoalannya, orang lebih senang tidak diatur ketimbang diatur. "Ketika diatur biasanya saya boleh lewat situ sekarang tidak boleh, saya harus muter dan lain-lain, kendala seperti itu," kata dia.

Yang pasti, bukan berarti Dishub DIY tidak memperhatikan keinginan masyarakat tapi yang penting adalah bicara soal keteraturan atau tertib lalu lintas serta persoalan polusi.

"Ini yang mungkin perlu dipahami. Masalah kendala ada banyak hal termasuk kendala sosial. Kami pun kalau misalnya disuruh mencari lahan parkir, kita sudah tidak bisa lagi," kata alumnus Teknik Arsitektur UNS Surakarta ini. **(kus/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005